

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan salah satu acuan bagi peneliti untuk menyusun dan mengembangkan penelitian dengan fokus dan lokus yang berbeda. terdapat 10 penelitian terdahulu yang relevan dengan rincian sebagai berikut:

Pertama : Penelitian berjudul “Pemulihan Tanaman Apel di Desa Gubugklakah, Poncokusumo sebagai Implementasi Sistem Inovasi Daerah (Kabupaten Malang)” yang di tulis oleh (Kuntari & Madiyanto, 2019) Hasil riset menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pertanian Daerah (SIDa) oleh pemerintah melibatkan pelatihan bagi petani. Dalam pelatihan ini, petani memperoleh pengetahuan baru dan keterampilan terkini dalam mengatasi permasalahan terkait hama dan penyakit pada tanaman apel. Selain itu, para petani kembali tertarik untuk memperluas budidaya apel, dan mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pakar pertanian guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Demplot yang sukses juga dibangun dengan memperlakukan pohon apel dengan cara tertentu; tanaman yang diberi pupuk tambahan akan tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berlimpah. Relevansi dari penelitian ini untuk peneliti adalah dengan implementasi terkait SDIa yang dilakukan oleh pemerintah untuk petani apel di kota Batu, sehingga usaha tani ini menjadi berkembang dan memberikan banyak manfaat yang dapat diambil. selain itu , kegiatan atau program yang dilakukan ini juga bisa di jadikan bahna untuk studi banding agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk pemerintah dalam revitalisasi lahan apel di kota Batu.

Penelitian yang terbatas ini menitikberatkan pada perbandingan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini dalam konteks pengkajian implementasi Sistem Informasi Pertanian Daerah (SIDa) oleh pemerintah. Fokus utamanya adalah pada pelatihan yang diselenggarakan untuk petani sebagai upaya meningkatkan pemahaman mereka terhadap SIDa. Tujuan dari penelitian ini adalah agar petani memperoleh pengetahuan baru dan keterampilan baru dalam menangani

masalah hama dan penyakit pada tanaman apel. Secara spesifik, penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan program revitalisasi lahan apel di kota Batu.

Kedua : Penelitian berjudul “Petani Apel dan Perubahan Fungsi Lahan Studi Deskriptif Petani Apel Batu di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu” yang di tulis oleh (Wahyudi, 2020). Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek ekologis memiliki dampak negatif bagi petani apel di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Petani apel di sana telah mengadopsi prinsip keselamatan ekonomi subsistensi dengan berbagai cara, seperti menjual sebagian tanahnya dan mengalihfungsikannya untuk tanaman lain, tetapi tetap mempertahankan tanaman apel, atau menjual lahan dan menggunakan hasilnya untuk mendapatkan lahan di daerah lain. Tanah tidak hanya merupakan sumber daya alam, tetapi juga berperan sebagai aset dalam ekonomi pasar. Berbagai fungsi lahan membantu mendorong alokasi optimal dan pemanfaatan sumber daya lahan secara efisien (Guo & Liu, 2021). Di samping itu, beberapa petani mencoba menambah penghasilan mereka dengan menyewakan lahan untuk budidaya buah-buahan dan sayur-sayuran. Meskipun terdapat perbedaan dalam metodologi dan prosedur pengelolaan, namun kesamaan penekanan pada perkebunan apel di Kota Batu menjadikan hasil tersebut relevan dengan penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian lain, penelitian ini menemukan bahwa variabel ekologi memberikan dampak buruk terhadap kebun apel di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Secara khusus, penelitian ini menggali pelaksanaan kebijakan program regenerasi lahan apel di Kota Batu dan bagaimana konsep keselamatan ekonomi subsisten digunakan oleh produsen apel untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Ketiga : Penelitian berjudul “Studi Kesesuaian Lahan Dalam Rangka Revitalisasi Tanaman Apel Di Batu, Malang” yang di tulis oleh (Sativandi Riza, Prof. Dr.Ir. Azwar Maas, 2013). Adanya hubungan antara ketinggian dan produktivitas tanaman apel terungkap dalam penelitian ini. Dengan luas lahan 0,2 Ha dan 100 pohon, kebun apel di lokasi 4 dan 5 (L05) cukup produktif dengan hasil panen 1 ton setiap musim tanam. $Produksi = -13,1 + 1,84(KB) - 0,0149(Kemiringan)$ merupakan model kegiatan revitalisasi yang juga dirumuskan dalam penelitian ini; model mempunyai nilai R2 sebesar 0,935. Selain itu, terdapat

model lain yang berkaitan dengan nilai bersih sekarang (NPV), yaitu $NPV = -87,2 + 10,8(\text{Produksi})$, dengan nilai R^2 sebesar 0,862. Relevansi penelitian ini terletak pada fokus bersama mengenai revitalisasi tanaman apel di Kota Batu, Malang. Hanya saja dalam penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda. Karen lebih membahas terkait peran pemerintah atau lembaga kemasyarakatan.

Penelitian yang terbatas ini menyoroti perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian terkini, dengan fokus khusus pada analisis dampak hubungan antara ketinggian dan produktivitas tanaman apel. Secara lebih mendalam, penelitian ini memeriksa implementasi kebijakan program revitalisasi lahan apel di Kota Batu.

Keempat : Penelitian berjudul “Analisis Trend Tanaman Jeruk dan Apel di Kota Batu” yang di tulis oleh (Rahmawati, 2022). (1) Trend produksi apel menunjukkan kecenderungan menurun, sementara untuk jeruk mengalami kenaikan, (2) Trend luas lahan budidaya apel mengalami penurunan, sementara luas lahan jeruk mengalami peningkatan, (3) Jumlah tanaman apel mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020, sedangkan jumlah tanaman jeruk mencatat peningkatan tertinggi pada tahun 2021. Relevansinya dengan penelitian ini yaitu luas lahan apel yang menurun dan buah jeruk justru mengalami peningkatan. Hal ini yang bisa di jadikan sebagai referensi untuk menjadi pembelajaran seperti apa revitalisasi lahan apel di daerah yang sama untuk bisa menghasilkan hasil panen yang sama baik dan sama meningkatnya dengan usaha tani jeruk.

Analisis Tren Tanaman Apel dan Jeruk di Kota Batu menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Lebih tepatnya, kebijakan inisiatif restorasi lahan apel Kota Batu menjadi subjek kajian terbaru ini.

Kelima : Penelitian berjudul “Fenomena Peralihan Usaha tani Apel Ke Komoditas Lain Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu” yang di tulis oleh (Farida et al., 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak petani apel di Kabupaten Bumiaji yang kini fokus pada tanaman lain seperti tomat, wortel, brokoli, cabai, brungkul, bawang merah, daun bawang, jeruk, bunga potong, dan masih banyak lagi selain apel. Beberapa faktor berkontribusi terhadap perubahan praktik pertanian di kalangan petani apel. Berikut beberapa faktor tersebut: 1) meningkatnya biaya produksi; 2) menurunnya kualitas lahan; 3) cuaca tidak

menentu; 4) meningkatnya keanekaragaman penyakit yang menyerang tanaman apel; 5) titik di mana pohon apel berhenti menghasilkan buah; 6) perubahan harga penjualan apel; dan 7) terbatasnya pengaruh organisasi petani. Relevansi nya dengan penelitian ini yaitu dengan mengetahui apa yang menjadi kendala usaha tani pada komoditas apel di daerah tersebut bisa di analisa untuk di jadikan contoh agar di kota batu yang di teliti ini untuk merealisasikan revitalisasi lahan apel berjalan maksimal.

Penelitian yang terbatas ini menitikberatkan pada perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian terkini yang berjudul "Fenomena Peralihan Usaha Tani Apel ke Komoditas Lain di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu." Lebih spesifik, penelitian ini memfokuskan pada analisis implementasi kebijakan program revitalisasi lahan apel di Kota Batu.

Keenam : Penelitian berjudul “Penilaian praktek GMP Dan SSOP DI Katering Apel Malang. Serjana Thesis, Universitas Brawijaya” yang di tulis oleh (Nur Faridhatul Chasanah Fauziah., 2017). Untuk menjaga keamanan produk dan memastikan layak dikonsumsi, industri katering harus mematuhi standar terkait dengan menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP). Kepatuhan pengolahan Malang Apple Catering terhadap GMP dan SSOP menjadi fokus investigasi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian antara lain pengumpulan data, melakukan wawancara, serta observasi dan penilaian lapangan. Tingkat penerapan GMP dan SSOP memenuhi norma yang ditetapkan, dengan nilai GMP mencapai 88,62% dan SSOP mencapai 84,18%, menurut data penilaian. Beberapa faktor yang diperhatikan dalam penerapan GMP, termasuk namun tidak terbatas pada: lokasi dan lingkungan sekitar, struktur dan fasilitas, mesin manufaktur, pengendalian proses, barang jadi, label dan informasi produk, kebersihan pribadi karyawan, pengepakan, pergudangan, transportasi, bahan, dokumentasi , dan rekaman. Air yang aman, permukaan yang bersih dan menyentuh makanan, tidak ada kontaminasi silang, makanan terlindungi, produk berbahaya diberi label dengan benar, penyimpanan yang benar, pemantauan kesehatan karyawan, dan pengelolaan hama adalah bagian dari penerapan SSOP. Barang akhir dari Malang Apple Catering memiliki kualitas yang baik, namun ada bagian GMP dan SSOP yang mungkin perlu diperbaiki. Hal

ini terutama berlaku dalam hal luasnya fasilitas dan program sanitasi serta ketersediaan fasilitas ganti pakaian bagi karyawan. Relevansi nya dengan penelitian ini yaitu dengan mengetahui apa yang harus kita ketahui sebagai mana kualitas apel yang akan dikonsumsi sesuai dengan SOP pengolahan yang higienis, sehingga buah apel akan terus melambung harga jualnya, dan akan menghasilkan bagi para petani apel, karena meningkatkan kualitas apel yang bagus dan higienis, maka revitalisasi lahan apel berjalan maksimal.

Penelitian terbatas ini mencakup perbandingan antara penelitian sebelumnya dan penelitian terkini yang berjudul "Mengukur dan Mengevaluasi Implementasi GMP dan SSOP pada Proses Pengolahan di Katering Apel Malang." Secara lebih spesifik, penelitian terbaru ini fokus pada analisis pelaksanaan kebijakan program revitalisasi lahan apel di Kota Batu.

Ketujuh : Penelitian berjudul “Pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan modal terhadap produksi apel di Desa Tulungrejo Kota Batu” yang di tulis oleh (Saputra & Sumanto, 2022). Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Kota Batu pernah menjadi pusat produksi apel di Indonesia, produksi apel di wilayah tersebut terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan volume produksi apel di Desa Tulungrejo Kota Batu dengan faktor luas lahan, tenaga kerja, dan modal. Melalui penggunaan kuesioner, 79 petani Desa Tulungrejo mampu berkontribusi dalam penelitian kuantitatif ini. Regresi berganda, uji F, uji t, koefisien determinasi, dan uji asumsi standar semuanya dilakukan terhadap data menggunakan SPSS 25. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel independen—luas lahan, tenaga kerja, dan modal—berpengaruh signifikan terhadap output apel, dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih rendah dari 0,05. Selain modal (0,000) yang kurang dari 0,05), hanya tenaga kerja (0,027) yang mempunyai pengaruh besar terhadap produksi apel. Relevansinya dengan penelitian ini merupakan pengaruh yang sangat besar terhadap produksi apel di Ds. Tulung rejo, Kota Batu. Dikarekan adanya lahan yang tidak memadai untuk memproduksi buah apel semaksimal mungkin, begitupun adanya modal, tenaga kerja. Maka ketika 3 poin tersebut belum bisa teratasi maka produksi buah apel di desa tersebut tidak akan berjalan maksimal dan nantinya akan berdampak kepada petani.

Penelitian terbatas ini memfokuskan perbandingan antara penelitian sebelumnya dan penelitian terkini yang berjudul "Pengaruh Luas Lahan, Tenaga Kerja, dan Modal terhadap Produksi Apel di Desa Tulungrejo, Kota Batu." Dengan lebih spesifik, penelitian terbaru ini mengeksplorasi implementasi kebijakan dalam program revitalisasi lahan apel di Kota Batu.

Kedelapan : Penelitian berjudul “Analisis Keberlanjutan Rantai Pasok Apel Di Kabupaten Malang Menggunakan Dinamika Sistem” yang di tulis oleh (Bawindaputri et al., 2022). Apel, tanaman tradisional di Kabupaten Malang, mengalami penurunan produktivitas karena beberapa faktor seperti konversi lahan, perubahan iklim, penggundulan hutan, dan umur pohon. Karena itu, rantai pasok apel di Kabupaten Malang bisa terancam. Dengan tujuan mengembangkan rantai pasok apel berkelanjutan di Kabupaten Malang, penelitian ini memodelkan beberapa skenario dan menyarankan kebijakan yang dapat mewujudkan visi tersebut. Keseluruhan model terdiri dari sub-model ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah dua puluh pedagang, tiga pengepul, dan lima puluh tiga petani. Metrik yang digunakan meliputi penyerapan tenaga kerja, jumlah lahan terdegradasi, pendapatan petani, keuntungan pengepul, keuntungan pengecer, dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2020–2030, kita dapat memperkirakan tiga kemungkinan masa depan: status quo, peningkatan produktivitas melalui kepemilikan lahan, dan situasi aktual. Perolehan lahan tahunan sebesar 1,15%, penurunan tingkat konversi menjadi 2,93%, dan peningkatan produktivitas sebesar 5% merupakan bagian dari skenario 3, yang memberikan kondisi paling menguntungkan menurut data simulasi. Skenario ini menghasilkan 4.905.656 kg apel pada tahun 2030 dengan menggunakan tingkat lapangan kerja sebanyak 22.349 orang per hektar dan luas lahan terdegradasi sebesar 11,7 hektar. Petani memperoleh penghasilan masing-masing 26.374.922.326 dan pengumpul memperoleh 31.597.327.651 dan keuntungan. terjual sebanyak 27.996.576.448 unit. Penurunan luas lahan dan produksi apel diperkirakan dapat diatasi dengan menerapkan skenario 3. Rehabilitasi lahan, peralihan ke pertanian organik, insentif dan pelatihan bagi petani, serta peraturan komoditas apel yang lebih ketat merupakan bagian dari rekomendasi ini. Pengukuran. Prosedur kelangsungan produksi apel dalam jangka panjang relevan

dengan penyelidikan ini. Tindakan kebijakan yang mungkin dilakukan termasuk mendorong dan mendukung produsen melalui pelatihan dan insentif keuangan, meningkatkan peraturan terkait komoditas apel, berupaya memperbaiki kondisi tanah, dan beralih ke metode pertanian organik.

Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian-penelitian yang ada saat ini adalah penekanan pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang kurang mendapat perhatian dalam literatur. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendukung keberlanjutan rantai pasok apel di Kabupaten Malang dengan memodelkan berbagai skenario dan menawarkan saran kebijakan. Sementara itu, penelitian terbaru lebih khusus memeriksa implementasi kebijakan dalam program revitalisasi lahan apel di Kota Batu.

Kesembilan : Peneliti berjudul “Penentuan Kesesuaian Lahan Budidaya Buah Apel Di Kota Batu Menggunakan Fuzzy Inference System Tsukamoto” yang di tulis oleh (Mar’i et al., 2022). Menurut penelitian ini, berkurangnya hektar lahan yang tersedia untuk menanam apel di Kota Batu, merupakan alasan utama menurunnya produksi apel. Jika mereka ingin meningkatkan hasil, petani harus pilih-pilih mengenai lahan yang mereka garap. Karena memilih lahan yang tepat bukanlah sebuah hal yang mudah, petani dapat mengambil manfaat dari menggabungkan pendekatan Tsukamoto dengan sistem Inferensi Fuzzy untuk menemukan tempat terbaik untuk menanam apel. Untuk menentukan tingkat kemampuan adaptasi lahan, pendekatan ini terutama mempertimbangkan empat faktor: curah hujan, kedalaman perakaran efektif, kemiringan lereng, dan erosi. Kajian ini penting karena menggunakan masukan dari kondisi untuk mengklasifikasikan lahan penanaman menjadi sangat sesuai, cukup dapat diterima, cukup sesuai, atau tidak sesuai, bergantung pada temuan penilaian. Perhitungan penelitian menunjukkan tingkat presisi 100% ketika mengukur kebenaran sistem menggunakan aturan yang berasal dari literatur.

Ada penelitian terbatas terkait dengan penelitian terdahulu yang mana ada Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian terkini terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu berjudul "Penentuan Kesesuaian Lahan Budidaya Buah Apel di Kota Batu Menggunakan Fuzzy Inference System Tsukamoto."

Sementara itu, penelitian terkini lebih khusus membahas implementasi kebijakan dalam program revitalisasi lahan apel di Kota Batu.

Kesepuluh : Penelitian berjudul “Analisis Spasial Untuk Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Apel Di Kota Batu - Jawa Timur” yang di tulis oleh (Haji et al., 1999). Penurunan output komoditas apel mungkin diakibatkan oleh rekomendasi penelitian ini untuk mengurangi luas lahan perkebunan apel. Untuk meningkatkan hasil panen apel, perlu dilakukan kajian dampak pengurangan luas areal perkebunan apel. Optimalisasi pemanfaatan lahan yang berpotensi sebagai perkebunan apel menjadi tujuan pengkajian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil apel. Penggunaan teknologi berbasis komputer menjadi suatu keharusan untuk mendukung analisis, manipulasi, dan penyajian informasi dalam format tabel dan spasial. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis menjadi penting karena mampu memberikan gambaran, penjelasan, dan estimasi kondisi faktual suatu wilayah. Kajian ini penting karena bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian suatu bidang tanah untuk peruntukan tertentu; lebih spesifiknya mengkaji kelayakan kebun apel di Kota Batu. Dengan 89,92% program studi adalah Sarjana dan 10,08% program Magister, statistik dengan jelas menunjukkan bahwa ada dua kelompok utama. Kelas S1 meliputi bidang: Sumber Brantas, Sumbergondo, Tulungrejo, Punten, Bulukerto, Gunungsari, Sidomulyo, Bumiaji, Sumberejo, Pandanrejo, Giripurno, Ngaglik, Songgokerto, Pendem, Mojorejo, Tlekung, dan Oro-oro Ombo, dievaluasi berdasarkan kesesuaian lahan. Evaluasi Kota Batu. Desa Dadaprejo, Junrejo, Beji, Temas, Sisir, dan Torongrejo semuanya menawarkan gelar Master.

Ada penelitian terbatas terkait dengan penelitian terdahulu yang mana ada Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian terkini terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berjudul "Analisis Spasial untuk Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Apel di Kota Batu, Jawa Timur." Sementara itu, penelitian terkini lebih khusus membahas implementasi kebijakan dalam program revitalisasi lahan apel di Kota Batu.

Dalam penelitian ini, kami membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan tinjauan literatur. Untuk menentukan kesesuaian studi panel ini dengan penelitian sebelumnya dan

untuk memberikan penjelasan atas orisinalitasnya, maka perlu dilakukan tinjauan literatur yang relevan. Terdapat perbedaan pada sepuluh penelitian sebelumnya terkait fokus penelitian, fokus penelitian ini Implementasi Program Revitalisasi Lahan Apel Di Kota Batu, perbedaan pada metode penelitian, teori penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan teori Edward III, dan lokasi penelitian di dinas pertanian dan ketahanan pangan kota batu.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Hal yang terjadi setelah arahan kebijakan dikeluarkan secara formal dikenal sebagai implementasi kebijakan, dan hal ini mencakup pengelolaan masukan untuk menghasilkan keluaran atau hasil bagi masyarakat. Ketika membandingkan proses pembuatan kebijakan dengan tahap implementasi, kita akan melihat bahwa tahap implementasi sangatlah berbeda. Pertama, adanya pemikiran bottom-up yang memandu pembuatan kebijakan; ini adalah pendekatan yang dimulai dengan mendengarkan harapan, kebutuhan, dan dukungan anggota masyarakat. Sebaliknya, implementasi kebijakan menggunakan logika top-down, yaitu pengurangan pilihan kebijakan yang luas dan menyeluruh menjadi langkah-langkah yang lebih spesifik dan pada tingkat mikro.

Grindle, (2017) menyatakan, Pelaksanaan merupakan serangkaian prosedur administratif yang, dalam banyak kasus, dapat dilakukan penyelidikan pada tingkat program individual. Menurut Van Meter dan Horn, sektor bisnis dan pemerintah bekerja sama, terkadang dalam kelompok kecil, untuk menerapkan kebijakan. Menurut Grindle, fase implementasi tidak dapat dimulai sampai tujuan dan sasaran telah ditetapkan, rencana kegiatan telah dikembangkan, dan sumber daya telah didistribusikan dan dialokasikan.

Implementasi adalah upaya untuk membangun koneksi yang memungkinkan kebijakan dilaksanakan melalui inisiatif pemerintah. Hasil yang diharapkan merupakan kekuatan pendorong di balik pengembangan prosedur ini. Suatu program dikembangkan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran kebijakan, dengan maksud untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara ringkas, implementasi adalah proses yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan mengubah ide-ide abstrak menjadi tindakan nyata. Dari sudut pandang penelitian, kebijakan juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi tindakan yang dipilih sedemikian rupa sehingga menjamin: (1) kebijakan dapat berjalan secara berkesinambungan dan (2) dapat dilaksanakan dengan baik. Ada dua faktor yang dapat digunakan untuk menentukan apakah implementasi suatu kebijakan berhasil: pertama, kecukupan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, yang mencakup tindakan yang diambil oleh kebijakan tersebut, dan kedua, pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan untuk menentukan apakah tujuan kebijakan tersebut benar atau tidak tercapai (Syahrul Mubarak, 2017).

Pembuatan kebijakan, menurut pandangan ini, mengambil bentuk program yang mewujudkan kebijakan. Investigasi terhadap program publik, hasil, dampak, dan kinerjanya merupakan bagian dari analisis kebijakan. Bagi para konsultan, anggota parlemen, dan pengambil keputusan di pemerintahan, kebijakan ini mutlak harus dilakukan dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Inisiatif pemerintah yang efektif dapat mendorong kemajuan kawasan ini dan memberikan landasan bagi masa depan. Untuk mewujudkan kesepakatan bersama, kebijakan dirumuskan untuk mengatur kehidupan sehari-hari individu.

Hasil dari program-program ini sering kali berupa proyek-proyek spesifik lokasi tanpa rencana keberlanjutan secara menyeluruh (Tzoumis & Driehorst, 2016) Untuk mengevaluasi bagaimana revitalisasi lahan apel terjadi di kota batu, kami memulai dengan tinjauan terhadap empat indikator utama dan rincian lebih lanjut tersedia mengenai Program revitalisasi lahan apel.

2. Model Implementasi Kebijakan

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik tetap sesuai dengan maksud awalnya, maka perlu mengacu pada sejumlah model sebagai tolok ukurnya. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan memberikan kerangka kerja untuk mendefinisikan keadaan dan peristiwa yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan, yang membantu untuk memahami perilaku yang terjadi dalam konteks ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas

kebijakan harus memanfaatkan model implementasi kebijakan secara ekstensif. Para ahli sepakat bahwa ada sejumlah model implementasi kebijakan yang umum digunakan dan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Pendekatan pelaksanaan kebijakan publik yang diajukan oleh Grindle dikenal sebagai . *“Implementation as a Political and Administrative Process”*. Menurut Grindle, (2017), Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik dapat diukur melalui pencapaian hasil akhirnya (outcomes), yang mencakup apakah tujuan yang diinginkan berhasil dicapai atau tidak. Evaluasi keberhasilan ini melibatkan dua aspek utama: 1. Proses Kebijakan: Ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan rencana aksi yang telah ditentukan. 2. Pencapaian Tujuan Kebijakan (Impact) : Melibatkan evaluasi dampak kebijakan pada masyarakat, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Ini mencakup tingkat perubahan yang terjadi dan penerimaan oleh kelompok sasaran. Tujuannya adalah (Hudson et al., 2019) untuk memastikan para pembuat kebijakan lebih waspada terhadap kepraktisan implementasi dengan meneliti kelayakan proposal kebijakan secara lebih cermat sejak awal sehingga menghasilkan “desain kebijakan” yang lebih baik.

Selain itu, (Baroroh, 2020) Derajat implementasi kebijakan yang mencakup substansi kebijakan dan lingkungan implementasi (konteks implementasi) dikatakan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kepentingan yang terkena dampak, manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang diperlukan hanyalah beberapa topik yang dimasukkan dalam kebijakan. Agar implementasi kebijakan berhasil, semua faktor ini harus ada.

3. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle, dan Quade 2017) Penting untuk mempertimbangkan kebijakan, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan ketika mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Memilih kebijakan yang tepat sangatlah penting karena dapat mendorong keterlibatan masyarakat sebaik mungkin dalam mencapai tujuan. Dalam hal pelayanan publik, peran organisasi pelaksana

menjadi sangat penting setelah kebijakan dipilih. Hal ini karena organisasi pelaksana mempunyai kekuasaan dan sumber daya untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Lingkungan kebijakan juga memiliki peran penting, dan pandangan positif atau negatif terhadap suatu kebijakan dapat mempengaruhi dukungan dan, akhirnya, kesuksesan implementasinya. Pandangan positif dari lingkungan akan mendukung implementasi, sementara pandangan negatif dapat menyebabkan konflik sikap dan mengancam keberhasilan proses implementasi. Selain tiga variabel utama yang telah disebutkan, tingkat kepatuhan penerima manfaat kebijakan merupakan hasil langsung lain dari pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak sosial dari kebijakan tersebut.

4. Pengertian Revitalisasi

Dalam konteks harafiah, revitalisasi bermakna "menghidupkan kembali", yang tidak hanya mencakup pengaktifan kembali elemen-elemen yang sebelumnya ada, tetapi juga melibatkan penyempurnaan struktur, penyesuaian mekanisme kerja, serta peningkatan semangat dan komitmen sesuai dengan kondisi yang baru. Secara terminologi, revitalisasi diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk menghidupkan atau menggalakkan kembali suatu entitas. (Trilestari, 2019).

Revitalisasi adalah upaya untuk merevitalisasi lingkungan atau bagian kota metropolitan yang pernah berkembang pesat dan pernah mengalami masa-masa sulit. Ada kemungkinan revitalisasi pada tingkat global dan mikro. Perbaikan aspek fisik, ekonomi, dan sosial masyarakat merupakan bagian dari proses revitalisasi. Setiap rencana untuk merevitalisasi suatu lingkungan harus mempertimbangkan sejarah komunitas, kepentingan, keunikan lokasi, dan citra tempat agar potensi wilayah tersebut dapat terwujud sepenuhnya (Danisworo, 2002). Revitalisasi bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki aspek fisik semata, melainkan juga melibatkan peningkatan ekonomi masyarakat serta pemberdayaan budaya setempat. warisan budaya dapat dipandang sebagai aset khusus kota-kota kecil dan menengah, yang sering menghadapi stagnasi atau penurunan populasi namun masih memiliki banyak bangunan bersejarah (Knipschild & Zöllter, 2021).

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan revitalisasi menekankan bahwa partisipasi mereka bukan hanya dalam rangka mendukung

formalitas, tetapi juga harus melibatkan berbagai lapisan masyarakat di wilayah tersebut, bahkan secara lebih luas. (Adisakti, 2002). Penting untuk memprioritaskan kepentingan strategis daerah yang berkaitan dengan kegiatan sosial-ekonomi dan karakter fisik kota, mengingat adanya mekanisme pengendalian dan pengendalian dalam rencana revitalisasi. Rancang kota menjadi instrumen kunci dalam memberikan arahan dan kontrol untuk menciptakan lingkungan binaan yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan dan fungsi baru.

5. Materi Revitalisasi

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 18 Tahun 2010 Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Pedoman Revitalisasi Kawasan, prakarsa revitalisasi diartikan sebagai upaya meningkatkan fungsi suatu kawasan melalui rekonstruksi guna meningkatkan manfaatnya. Suatu kawasan yang pemanfaatan utamanya adalah untuk pertanian atau perlindungan disebut dengan kawasan (pasal 1 ayat 4).

Diawali dengan studi yang meliputi beberapa poin, yaitu:

- a. Kajian Kebijakan
- b. Analisis potensi dan tantangan suatu wilayah, mencakup faktor-faktor seperti peran strategis, kelangsungan hidup jangka panjang, dinamika sosial budaya, kepemilikan lahan, nilai, aksesibilitas, konektivitas ke pusat kota, hubungan spasial dengan sistem kota, infrastruktur, jaringan aktivitas, tingkat kepadatan fisik dan populasi, kualitas lingkungan, kenyamanan fasilitas, infrastruktur pelayanan, dan struktur kelembagaan.
- c. Pengenalan signifikansi budaya dan sejarah masa lalu yang pernah dimiliki suatu wilayah, melibatkan aspek fungsi wilayah, karakteristik fisik (tipe bangunan dan tata ruang), serta nilai-nilai adat istiadat yang melekat.
- d. Penetapan prioritas dalam proses revitalisasi suatu wilayah.
- e. Pemetaan dan penandaan batas wilayah kawasan.

Skenario revitalisasi kawasan dilakukan untuk dapat meningkatkan beberapa poin, yaitu : (Pertama, keluaran moneter; kedua, lingkungan yang

kondusif bagi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya baik dari segi bentuk dan ruang. Ketiga, pengelolaan kawasan yang berkelanjutan). Menurut (Tzoumis & Driehorst, 2016) program revitalisasi lahan tidak disatukan karena merupakan program dan kebijakan publik yang mencerminkan kerangka hukum, dinamika organisasi, dan pendekatan lingkungan yang berbeda. Meskipun tujuan dari masing-masing program revitalisasi lahan, baik secara implisit maupun eksplisit, adalah keberlanjutan, program-program tersebut dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda dengan aktor kebijakan yang tumpang tindih dan terkadang saling bersaing.

6. Konsep Revitalisasi

Prinsip dasar dari revitalisasi pertanian adalah pemahaman untuk mengembalikan signifikansi sektor pertanian dengan proporsi dan keseimbangan yang sesuai serta kontekstual. Dengan kata lain, revitalisasi bertujuan menyegarkan kembali keberdayaan lahan, meningkatkan vitalitas, dan memperkuat kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional, tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya. (Agustine sieman, 2022).

Revitalisasi merujuk pada usaha meningkatkan sektor pertanian dengan lebih banyak melibatkan berbagai pihak serta menciptakan keterlibatan dan kerjasama yang kuat antara pemangku kepentingan terkait. Ini juga melibatkan perubahan paradigma masyarakat untuk memahami bahwa pertanian bukan hanya aktivitas bercocok tanam semata, melainkan memiliki beragam fungsi dan berperan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Konsolidasi komprehensif pegunungan, sungai, hutan, ladang dan desa dapat membantu mendorong pengembangan pariwisata pedesaan dan revitalisasi industri. (Zhou et al., 2020).

Tujuan-tujuan revitalisasi pada lahan apel ini nampaknya hanyalah sebuah amandemen terhadap tujuan-tujuan pemerintah yang sosialis'. (Yan et al., 2021) membahas peralihan lahan antara lahan konstruksi dan lahan budidaya. Baik sirkulasi tanah maupun peralihan tanah dianggap sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan masalah pedesaan. Pemerintah memisahkan lahan pedesaan dari perkotaan melalui rezim lahan ganda dan memberikan sedikit pintu terbuka untuk penyesuaian kebijakan dan perencanaan (Huang et al., 2020).

Seruan pemerintah untuk 'memahami pertanian dan mencintai kaum tani serta mencintai lahan nampaknya merupakan kebalikan dari wacana negatif yang telah berlangsung selama beberapa tahun mengenai pertanian apel di kota batu. Di masa lalu, pertanian merupakan pusat perhatian, dan petani merupakan kelompok profesional terkemuka di pedesaan Menurut (Zethary & Purnaweni, 2019), Revitalisasi terjadi ketika orang-orang bekerja untuk menghidupkan kembali blok kota atau lingkungan yang sedang mengalami masa-masa sulit. Proses revitalisasi melibatkan serangkaian tahapan dan memerlukan waktu tertentu. Hal-hal yang tercakup dalam revitalisasi meliputi:

- a. Intervensi fisik
- b. Rehabilitas ekonomi
- c. Revitalisasi sosial.

C. Tahapan Revitalisasi

Revitalisasi merupakan proses multi-langkah yang membutuhkan waktu dan mencakup unsur-unsur berikut:

1. Intervensi Fisik

Intervensi fisik merupakan langkah awal revitalisasi karena kondisi visual suatu kawasan berdampak langsung terhadap citra kawasan, yang pada akhirnya mempengaruhi daya tarik aktivitas dan pengunjung. Berbagai intervensi fisik dilaksanakan secara bertahap, seperti perbaikan dan pemeliharaan gedung, tata ruang hijau, sistem penghubung, signage, dan ruang terbuka regional. Landasan perencanaan fisik harus fokus pada jangka panjang untuk mempertimbangkan permasalahan lingkungan dan menjamin kelestarian lingkungan.

2. Rehabilitasi Ekonomi

Peremajaan kegiatan ekonomi merupakan bagian penting dari revitalisasi, yang dimulai dengan memulihkan peninggalan kuno perkotaan. Pengembangan fungsi campuran diperlukan untuk menginspirasi kegiatan sosial dan ekonomi baru, yang akan meningkatkan vitalitas.

3. Revitalisasi Sosial/Institusional

Suatu proyek revitalisasi dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan estetika dan kehidupan sosial masyarakat sekaligus menjadikan suatu tempat lebih layak huni bagi penghuninya. Upaya revitalisasi kawasan harus bertujuan untuk meningkatkan daya tarik sosial dan kualitas hidup di sana.

D. Tujuan Dan Sasaran Revitalisasi

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010, tujuan dari revitalisasi kawasan bertujuan untuk membuat tempat-tempat maju menjadi lebih hidup dengan menerapkan inisiatif perkotaan yang meningkatkan dan menstabilkan perekonomian lokal. Integrasi dengan sistem perkotaan, menciptakan lingkungan hidup yang layak, mengupayakan keadilan sosial, berdasarkan nilai-nilai budaya, dan memperhatikan kelestarian lingkungan merupakan komponen penting dari intervensi tersebut. (Hutsa, 2017).

Regenerasi fisik, manajerial, sosial, dan ekonomi menjadi empat konsep penuntun program kebangkitan ini. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pasar tradisional dengan harapan mereka kembali berbelanja di sana. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan pedagang dan mencapai kesejahteraan (Eni Candra Nurhayati, 2022) program revitalisasi ini dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi apel dan memperbaiki kondisi lahan apel agar lebih baik.

1. Tujuan Revitalisasi:

Tujuan dari revitalisasi kawasan bertujuan untuk menghasilkan pembangunan dan stabilitas ekonomi lokal dengan menjadikan kawasan terbangun lebih hidup melalui intervensi perkotaan. Kelayakan hidup, keadilan sosial, kepekaan budaya, dan kesadaran lingkungan adalah beberapa di antara tujuan-tujuan tersebut.

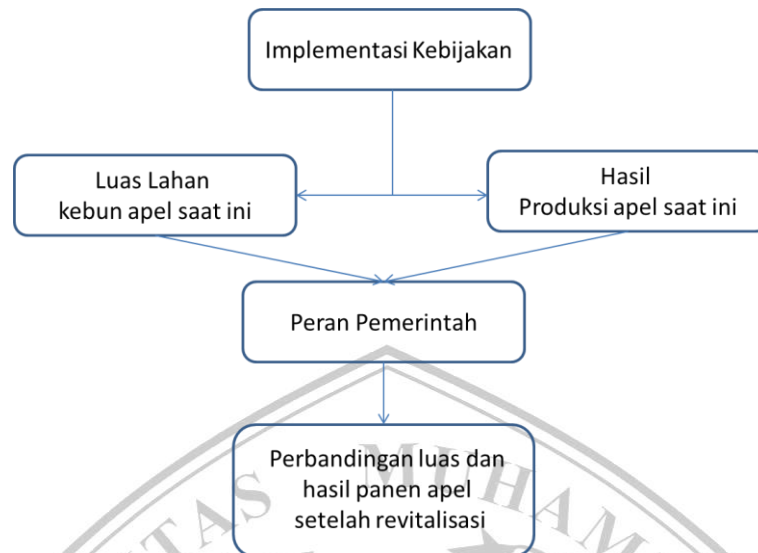
2. Sasaran Revitalisasi Kawasan:

Sasaran revitalisasi kawasan dapat dibagi menjadi beberapa aspek, di antaranya:

- a. Melakukan intervensi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

- b. Menumbuhkan lingkungan yang mendorong stabilitas dan keandalan dalam operasi perusahaan.
- c. Meningkatkan investasi jangka panjang dan nilai properti di kawasan tersebut dengan menurunkan faktor eksternal yang menurunkannya dan menaikkan harga properti untuk mencerminkan nilai tanah apel.
- d. Kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya; infrastruktur; dan integrasi tata ruang, infrastruktur, dan fasilitas komunitas kumuh yang terisolasi ke dalam sistem kota.
- e. Meningkatkan jumlah dan standar infrastruktur lingkungan seperti jalan, jembatan, air, drainase, sanitasi, dan sistem pengelolaan limbah; demikian pula, peningkatan fasilitas kawasan seperti pasar, kawasan industri, ruang sosial dan budaya, transportasi, dan ruang ekonomi (baik resmi maupun informal).
- f. Mencegah degradasi ekologi lingkungan dengan menjadikan fasilitas (amenities) kenyamanan kawasan menjadi lebih komprehensif.
- g. Melestarikan aset sejarah budaya perkotaan dengan menghindari “penghancuran diri” dan “penghancuran akibat kreasi baru,” dan dengan menjaga tempat-tempat dalam bentuk yang menopang tradisi sosial dan budaya setempat.
- h. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang ada untuk mengawasi rehabilitasi kawasan yang direvitalisasi sangatlah penting.
- i. Meningkatkan sumber daya manusia, struktur organisasi, dan kerangka peraturan untuk memperkuat institusi yang ada.
- j. Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memikirkan perluasan ke lingkungan baru.

E. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

